



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KASA PEMERINTAH ACEH		
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
TANGGAL	11-02-2020	NOMOR
WAKTU	12:00 Wib	105/Email
PARAF		

11-02-2020
11.20
YH
0119/k

Jakarta, 10 Februari 2020

Nomor : 061/1249/SJ

Sifat :

Lampiran :

Hal : Penerapan dan Pemanfaatan
Layanan *Online* di Aplikasi
SIOLA

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota.

di -

Seluruh Indonesia

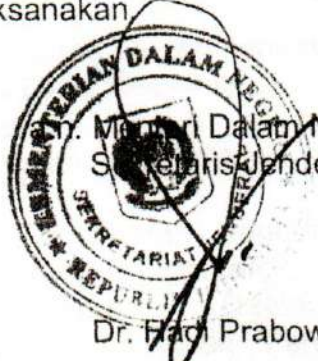
Menunjuk surat Menteri Dalam Negeri nomor 061/11744/SJ tanggal 25 Oktober 2019 Hal Pengembangan Layanan Administrasi di aplikasi SIOLA, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penggunaan kualitas layanan serta mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan tepat waktu yang berbasis sistem informasi *online* di lingkungan Kemendagri, diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah tersedia 28 (dua puluh delapan) layanan *online* di aplikasi SIOLA (Sistem Informasi *Online* Layanan Administrasi) terdiri dari:
 - 1) Registrasi Layanan Konsultasi;
 - 2) Ijin Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting Bagi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - 3) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - 4) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Daerah;
 - 5) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 - 6) Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing;
 - 7) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Kemasyarakatan;
 - 8) Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi;
 - 9) Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;
 - 10) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
 - 11) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
 - 12) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
 - 13) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;

- 14) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 15) Unit Layanan Gratifikasi;
 - 16) Penerbitan Kepmendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - 17) Penerbitan Surat Mendagri Tentang Penggantian Pejabat Administartor dan Pejabat Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota;
 - 18) Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Perangkat Daerah Provinsi;
 - 19) Mutasi Antar Daerah (slot);
 - 20) Pengusulan Caion Peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 21) Pengusulan Surat Keputusan dan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 22) Pengusulan Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 23) Pengusulan Perpanjangan Kartu Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 24) Pengusulan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 25) Pertimbangan Pinjaman Daerah Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
 - 26) Rekomendasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur;
 - 27) Penilaian Usulan Rencana Pendirian BUMD Provinsi / Kabupaten / Kota; dan
 - 28) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS).
2. Registrasi layanan dilakukan melalui aplikasi SIOLA sebagai gerbang utama layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri, diakses melalui: <https://ula.kemendagri.go.id>;
 3. Dokumen proses dan output layanan dilakukan secara *online*, **tidak melalui tatap muka** sehingga *output* layanan administrasi wajib di *upload* melalui aplikasi SIOLA dan pengguna layanan dapat *mendownload* di tempat masing-masing; dan
 4. Tatacara dan persyaratan pengajuan layanan administrasi dan konsultasi dapat diakses melalui <https://ula.kemendagri.go.id> atau dapat menghubungi (021) 3521468.

Sehubungan dengan hal tersebut diperintahkan kepada Saudara/i Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan aplikasi SIOLA dimaksud, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Persyaratan yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan



 Menteri Dalam Negeri
 Sekretaris Jenderal,
 Dr. Fachr Prabowo, MM

Tembusan:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kemendagri;
3. Direktur Jenderal di lingkungan Kemendagri;
4. Kepala Badan di lingkungan Kemendagri; dan
5. Plt. Rektor IPDN.